

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA BATU DALAM MELAYANI MASYARAKAT
MISKIN(PROGRAM PKH DAN BPNT)".**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Manajemen



Disusun Oleh :

AURELIA OKTAVIANI JUITA

2017210029

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2021

PERAN DINAS SOSIAL KOTA BATU DALAM MELAYANI MASYARAKAT MISKIN(PROGRAM PKH DAN BPNT)".

RINGKASAN

Kemiskinan merupakan masalah yang Di hadapi oleh semua Negara di dunia, termasuk Indonesia yang merupakan suata Negara Kemiskinaan yang merupakan hakekatnya persoalan klasik yang telah ada sejak keberadaan manusia yang sebagai penopang untuk meningkatnya kesejateran penduduknya. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penindakan yang dianggap paling sempuma. Program keluarga harapan dan bantuan pangan nontunai yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan, tetapi dalam hal ini masih banyak sekali Kendala dan masalah Yang mencakup data penerimaan penyaluran dorongan, penyelewengan pendamping dan sebagainya.

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas sosial dan faktor penghambat dan pendukungnya di Dinas Sosial Kota Batu. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik penentuan infonnan menggunakan purposive sampling, serta analiss data menggunakan reduksi informasi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mampu untuk memutuskan Mata rantai kemiskinan dengan memenuhi dan membantu dalarn penerimaan kebutuhan tiap hari. Selain Itu PkH Dan BPNT mampu mendesak serta mematuhi persyaratan dan kewaji ban yang diberi sebagai sarana buat proses dalarn pelayanan. Namun demikian, masih terdapat hal perlu di perbaiki dalam ketetapan sasaran dalam pelaksanaan PKH dan BPNT Untuk di perhatikan berikutnya.

Kata kunci: Dinas Sosial, Pelayanan, Kemiskinan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini merupakan Suatu Negara Kemiskinan Yang merupakan hakekatnya persoalan Klasik yang telah terdapat semenjak keberadaan Manusia yang selaku penopang Untuk meningkatnya Kesejahteraan penduduknya. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formulasi penanganan yang dianggap sangat sempurna. Secara berkelanjutan warga Indonesia kerap melihat kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk melihat tantangan perkembangan global. Dengan ini, adalah tujuan pembangunan nasional buat mewujudkan masyarakat yang adil serta makmur yang menyeluruh secara spiritual serta material dan menjalankan roda kehidupan dengan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial cocok dengan pasal 33 UUD 1945 yang dimana sebagai bentuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan serta kemakmuran untuk seluruh rakyat strategi penanganan kemiskinan masih wajib terus dikembangkan, terdapat banyak sekali kurang dalam memahami kemiskinan.

Di Indonesia permasalahan kemiskinan kerap terjalin masalah sosial yang senantiasa relevan dikaji terus-menerus, ini bukan cuma saja Karena masalah kemiskinan telah terdapat semenjak lama dan masih hadir ditengah tengah masyarakat dikala ini, melainkan karena saat ini gejalanya semakin Meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia(Edi Suharto 2001:138). Terciptanya warga yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945 merupakan cita-cita mulia bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini selalu memberikan atensi besar terhadap upaya masyarakat kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang di lakukan bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulangnya bukan saja terbatas pada hal Yang menyangkut ikatan sebab akibat timbulnya kemiskinan teta melibatkan juga preferensi nilai serta politik.

Kemiskinan sering terjadi karena Ada beberapa faktor yang bukan hanya faktor ekonomi tetapi seperti masalah pemasukan, tetapi meliputi faktor sosial misalnya pembelajaran, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Hal ini merupakan masalah mendasar yang sering terjadi menjadi pusat perhatian dunia. Secara umum konsep kemiskinan

dibagi menjadi dua kemiskinan absolut serta kerniskina relatif. Kerniskinan absolut adalah kelompok masyarakat yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Artinya kelompok masyarakat tersebut belum sanggup memenuhi standar kebutuhan minimumnya yaitu sandang pangan pendidikan serta kesehatan. Untuk kerniskinan relative diukur berdasarkan dua pendekatan antara lain pendekatan moneter dan non moneter. Kemiskinan relative ditentukan bersumber pada ketidakmampuan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subyektif (Syaiful, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan sosial pasal 29 huruf C menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten atau Kota yaitu memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang sosial menyelenggarakan kesejahteraan.

Peran Dinas Sosial tidak jauh beda dengan peran pemerintah sosial, yaitu membantu orang meningkatkan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dialami warga. Di dalam peran dinas sosial ini, ada program pemerintah yang bisa langsung turun ke masyarakat yaitu program keluarga harapan. Untuk menggapai tujuan, perlu diciptakan suatu program pemberdayaan sehingga sanggup mensejahterakan masyarakat. Melalui Program Keluarga Harapan untuk penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batu adalah bagaimana cara memberdayakan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan warga Kota Batu agar mencapai kesejahteraan yang jauh lebih baik. Melihat permasalahan yang terjalin, bagaimanakah pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah untuk masyarakat Kota Batu melalui Program Keluarga Harapan.

Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan pelatihan tersebut agar dapat diketahui peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan masyarakat Kota Batu agar menjadi lebih baik dan bermutu. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengulas masalah mengenai penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan warga, untuk itu penulis mengajukan dengan judul "**PERAN DINAS SOSIAL KOTA BATU DALAM MELAYANI MASYARAKAT MISKIN(PROGRAM PKH DAN BPNT)**".

1. 2 Rumusan Masalah

- I. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam Melayani masyarakat Miskin Kota Batu (program PKH serta BPNT)

2. Apa saja faktor Penghambat dan Pendukung Dinas Sosial dalam Melayani Masyarakat Miskin Kota Batu.

1.3 Tujuan

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Sosial dalam Melayani Masyarakat Miskin (Program PKH serta BPNT).
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Dinas Sosial dalam melayani Masyarakat Miskin.

1.4 Manfaat

Khasiat dari penulisan skripsi ini merupakan selaku berikut

I Manfaat Teoritis

- a. Bagi institusi, skripsi ini bisa menjadi bahan acuan Universitas dalam mewujudkan sesuatu impian di masa yang akan datang.
- b. Untuk lembaga, skripsi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah buat meningkatkan penanggulangan masyarakat Miskin Kota Batu.

II Manfaat Praktis

- a. Skripsi ini bisa di pakai bahan ajuan selanjutnya
- b. Skripsi ini dapat menambah wawasan terkait dengan peran dinas sosial dalam melayani Warga Miskin Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Rikardo. 2017. Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat miskin Melalui Program Eletronik Warung Kelompok usahaBersama Program Keluarga Harapan. Skripsi Perpusatakaan Universits Tribhuwana Tunggadewi Malang.
- Bhinadi, Ardinto. 2017. Penanggulangan Miskin Dan Pemerdayaan Masyarakat. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Djopari, Ratnia. 2008. Pengantar Ilmu Pemerintah. Jakarta: Universitas Terbuka
- Soeleman, Munandar. 2011. Ilmu sosial dasar. Bandung : refika aditama.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif , Kuantitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyrakat Memberdayakan masyarakat. Bandung : Refika Aditama.
- Sumodinigrat. 2000. Pemeberdayaan masyrakat dan JPS. Jakarta: PT Gramedia.
- Muslim Sabarisman. 2015. Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangn Kemiskinaan di Kota Suka Bumi. Jurnal Sosio Konsepsia. Volume. 4 No 3.
- Heryanti, 2019. Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone Dalam Menanggulungan Kemiskinan. Volume. 2 No 2.
- Citra Ayu Rahmanda. 2019. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kota Batu. Volume. 13 No 5.
- Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2026, Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial
- Undang-Undang No 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteran Sosial.
- Undang- Undang Dasar Tahun 1945